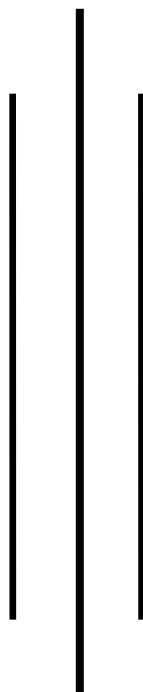




RENCANA KERJA

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2022-2027 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang sedang berjalan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur di Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis. Koreksi dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Akhirnya kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar diharapkan lebih termotivasi dengan memahami apa yang telah direncanakan untuk dicapai organisasi.

INSPEKTUR,

HERRI OKSTARIZAL, S.H
PEMBINA
NIP. 19810927 200502 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI :	ii
DAFTAR TABEL :	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.	7
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	31
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	45
BAB V : PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar	35
Tabel 4.1 Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024.	18
 Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.....	9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar	20
Tabel T-C.31 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar	22
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan	32
Tabel T-C.33 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar..	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024.

Sebagai salah satu OPD yang ada di Kota Pematang Siantar, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar. Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kota Pematangsiantar merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Pematang Siantar.

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD diawali dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja OPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja OPD. Rancangan awal Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra OPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rancangan Awal Rencana Kerja OPD ini dibahas dalam forum OPD atau forum gabungan OPD.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan forum OPD atau gabungan forum OPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD/Forum Gabungan OPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja OPD. Rancangan rencana kerja OPD disusun oleh masing-masing OPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan rencana kerja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Rancangan rencana kerja OPD yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir rencana kerja OPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja OPD oleh Wali Kota.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kota Pematang Siantar Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
16. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance & Clean Government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah :

1. Terciptanya suatu rencana pengawasan jangka pendek (1 tahun) atas pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 –

- 2027 yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna tercapainya visi-misi daerah serta *output* dan *outcome* yang direncanakan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja, penanganan atas pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi, Saberpungli, Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Daerah;
 4. Terciptanya basis bagi kerjasama dan koordinasi pengawasan dengan lembaga atau aparat pengawasan internal pemerintahan lainnya, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Renja Inspektorat Kota Pematangsiantar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja perangkat daerah, proses penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan Rencana Kerja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak hambatan tersebut terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan hasil perbandingan dan temuan-temuan setelah perbandingan tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan penjelasan tentang proses usulan program/kegiatan pemangku kepentingan dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Rencana Kerja perangkat daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD tahun bersangkutan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar melaksanakan 3 (tiga) program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Objek Pemeriksaan, adapun kegiatan dan sub kegiatan dari ketiga program tersebut antara lain yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini terdiri 1 (satu) sub kegiatan yaitu : pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan;
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu ;

- Pengawasan kinerja pemerintah daerah;
- Pengawasan keuangan pemerintah daerah;
- Reviu laporan kinerja;
- Reviu laporan keuangan;
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- Pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Fasilitas Pengawasan

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
- Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan triwulan pertama capaian atas pelaksanaan program/kegiatan pada Inspektorat Kota Pematang Siantar diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2023 Triwulan I

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra a PD) Tahun 2022- 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/Kegiatan/S ub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Progra m dan Kegiata n PD Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
										Targe t Renj a PD tahu n 2022	Realisa si Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)		
6	0	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah									
6	0	1	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah								
6	0	1	0	1	2	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70	0	0	0	14	14	20
6	0	1	0	1	2	0	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	0	0	0	2	2	20

6	0 1	0 1	2	0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10	0	0	0	0	2	2	20
6	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan								
6	0 1	0 1	2	0 2	0 1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275	0	0	0	0	55	55	20
6	0 1	0 1	2	0 2	0 2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	660	0	0	0	0	132	132	20
6	0 1	0 1	2	0 2	0 3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	660	0	0	0	0	132	132	20
6	0 1	0 1	2	0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	0	0	0	0	1	1	20
6	0 1	0 1	2	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

6	0 1	0 1	2	0 3	0 2	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	0	0	0	0	4	4	20
6	0 1	0 1	2	0 3	0 5	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	10	0	0	0	0	2	2	20
6	0 1	0 1	2	0 3	0 6	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	0	0	0	0	2	2	20
6	0 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kepegawaian								
6	0 1	0 1	2	0 5	0 9	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	275	0	0	0	0	55	55	20
6	0 1	0 1	2	0 5	1 0	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	0	0	0	0	1	1	20
6	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah								

6	0 1	0 1	2	0 6	0 5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 8	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	0 9	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 6	1 0	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	60	0	0	0	0	12	12	20

6	0 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6	0 1	0 1	2	0 7	0 2	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	0	0	0	3	3	100
6	0 1	0 1	2	0 7	0 5	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	0	0	0	0	30	30	100
6	0 1	0 1	2	0 7	0 6	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	150	0	0	0	0	30	30	20
6	0 1	0 1	2	0 7	1 0	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	0	0	0	0	30	30	100
6	0 1	0 1	2	0 7	1 1	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	0	0	0	0	30	30	100
6	0 1	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6	0 1	0 1	2	0 8	0 1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	0	0	0	0	12	12	20

6	0 1	0 1	2	0 8	0 2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 8	0 4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah'	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah								
6	0 1	0 1	2	0 9	0 1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	0	0	0	0	12	12	20
6	0 1	0 1	2	0 9	0 6	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	0	0	0	0	5	5	20
6	0 1	0 1	2	0 9	1 0	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	5	0	0	0	0	1	1	20
6	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level/Nilai Kapabilitas APIP								
							Persentase Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan								

							Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko									
6	0 1	0 2	2	0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
6	0 1	0 2	2	0 1	0 1	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33	0	0	0	0	4	4	12,12	12 12
6	0 1	0 2	2	0 1	0 2	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75	0	0	0	0	15	15	20	
6	0 1	0 2	2	0 1	0 3	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	0	0	0	0	6	6	20	
6	0 1	0 2	2	0 1	0 4	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	10	0	0	0	0	2	2	20	
6	0 1	0 2	2	0 1	0 6	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	0	0	0	0	1	1	20	
6	0 1	0 2	2	0 1	0 7	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	100	0	0	0	0	20	20	20	

6	0 1	0 2	2	0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
6	0 1	0 2	2	0 2	0 1	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25	0	0	0	0	5	5	20
6	0 1	0 2	2	0 2	0 2	<i>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75	0	0	0	0	15	15	20
6	0 1	0 3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level/Nilai Maturitas SPIP								
							Tingkat Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota								
6	0 1	0 3	2	0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
6	0 1	0 3	2	0 1	0 1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	20	0	0	0	0	4	4	20
6	0 1	0 3	2	0 1	0 2	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	20	0	0	0	0	4	4	20

6	0 1	0 3	2	0 2		Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi								
6	0 1	0 3	2	0 2	0 1	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20	0	0	0	0	16	16	80
6	0 1	0 3	2	0 2	0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30	0	0	0	0	8	8	26,666666 67
6	0 1	0 3	2	0 2	0 3	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50	0	0	0	0	10	10	20
6	0 1	0 3	2	0 2	0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	0	0	0	0	1	1	20

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar melakukan pengawasan terhadap :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal ;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- d. Pendampingan dan Asistensi

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, analisis lingkungan merupakan landasan dalam rencana strategis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal

A.1. Kekuatan

- a. Tersedianya jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dengan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas;
- b. Sebagian besar Pegawai Inspektorat telah mengikuti Diklat Fungsional;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan pengawasan;
- d. Meningkatnya tunjangan beban kerja bagi Aparat Fungsional Tertentu (JFA dan P2UPD).

A.2. Kelemahan

- a. Spesifikasi Disiplin Ilmu belum terpenuhi;
- b. Jumlah Pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan objek pemeriksaan;
- c. Kurangnya Kendaraan Dinas Operasional;

B. Analisis Lingkungan Eksternal

B.1 Peluang

- a. Sikap kritis masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan;
- b. Koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum;
- c. Komitmen Pimpinan/KDH yang tinggi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan
- d. PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP 18 Tahun 2016 dalam rangka penguatan fungsi Inspektorat.

B.2 Ancaman

- a. Ketidakstabilan kondisi politik di daerah; dan
- b. Kurangnya komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan itu maka kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi adalah melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan serta tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan kinerja, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027, yaitu :

1. Level/Nilai Kapabilitas APIP;
2. Level/Nilai Maturitas SPIP;
3. Nilai Maturitas Manajemen Risiko;
4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, sekurang- kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja. IKU Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Indikator Kinerja Keluaran (IKK) dari Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar antara lain:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- 2. Nilai Maturitas SPIP; dan
- 3. Kapabilitas APIP

Berikut merupakan tabel yang menyajikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

Tabel T-C. 30
 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah
 Kota Pematang Siantar

N o.	Indikator	SP M/s tan dar nas ion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anali sis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Level/Nilai Kapabilitas APIP		√	0	2	3	3	0	0	3	3	
2	Level/Nilai Maturitas SPIP		√	0	3	3	3	0	0	3	3	
3	Nilai Maturitas Manajemen Risiko		√	0	2	3	3	0	0	3	3	
4	Persentase Penyelesaia n Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasa n		√	0	80%	85%	90%	0	0	85%	90%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi kedepan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar saat ini dan ditahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
2. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peningkatan maturitas Manajemen Risiko dalam upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah;
5. Peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
6. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 telah mereviu Rencana Kerja RKPD, dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah di bidang pengawasan serta tugas pembantuan. Maka anggaran yang dibutuhkan untuk Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebesar 1% dari APBD sesuai dengan ketentuan perundangan.

Berikut dapat dilihat hasil reviu atas rancangan awal RKPD tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.

Tabel T-C. 31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar
tahun 2024

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspek torat	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3	2.151.35 9.696	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3	2.151.35 9.696		
		Inspek torat	Persentase Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	85			Inspektorat	Persentase Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	85			
		Inspek torat	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3			Inspektorat	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspek torat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.489.222 .457		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.489.222 .457	

	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5	124.101.871			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5	124.101.871	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15	465.382.018			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15	465.382.018	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	186.152.807			Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	186.152.807	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	62.050.936			Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	62.050.936	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	31.025.468			Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	31.025.468	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	20	620.509.357			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	20	620.509.357	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	662.137.239			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	662.137.239	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	155.127.339			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	155.127.339	

	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15	507.009.900		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15	507.009.900	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Level/Nilai Maturitas SPIP	3	1.147.942.310		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Level/Nilai Maturitas SPIP	3	1.147.942.310	
		Inspektorat	Tingkat Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota	90				Inspektorat	Tingkat Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota	90		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	248.203.743		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	248.203.743	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	124.101.871		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	124.101.871	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	4	124.101.871		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	4	124.101.871	
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi	100	899.738.568		Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi	100	899.738.568	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	4	310.254.679		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	4	310.254.679	

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	248.203.743			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	248.203.743	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	310.254.679			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	310.254.679	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	31.025.468			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	31.025.468	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	19.359.121.921			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	19.359.121.921	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	129.923.406			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	129.923.406	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	57.614.456			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	57.614.456	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	14.694.494			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	14.694.494	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2	57.614.456			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2	57.614.456	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	9.041.879.948			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	9.041.879.948	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	8.998.669.106			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	8.998.669.106	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132	14.403.614			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132	14.403.614	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132	14.403.614			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132	14.403.614	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1	14.403.614			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1	14.403.614	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	43.210.842			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	43.210.842	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	4	14.403.614			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	4	14.403.614	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2	14.403.614			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	2	14.403.614	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	14.403.614			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	14.403.614	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Kepegawaian	100	1.008.467.846			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Kepegawaian	100	1.008.467.846	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	950.853.390			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	950.853.390	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	57.614.456			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	57.614.456	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.005.364.851			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.005.364.851	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	36.070.686			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	36.070.686	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	65.685.843			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	65.685.843	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	77.586.342			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	77.586.342	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	137.875.926			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	137.875.926	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13.933.263			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13.933.263	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	69.912.200			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	69.912.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	562.832.600			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	562.832.600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	12	41.467.992			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	12	41.467.992	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	505.000.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	505.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		80.800.000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		80.800.000	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		121.200.000			Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		121.200.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	202.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	202.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.500.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50.500.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	284.521.452			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	284.521.452	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	73.376.500			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	73.376.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	53.221.352			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	53.221.352	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	157.923.600			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	157.923.600	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100	7.340.753.575		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100	7.340.753.575	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12	148.537.854		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12	148.537.854	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	101.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	101.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	7.091.215.722		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	7.091.215.722	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Sedangkan dari pokkir dan usulan Musrenbang kecamatan tidak ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada inspektorat oleh masyarakat yang turut serta Musrenbang tersebut.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pematang Siantar

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah ditetapkan pada tahun 2020 melalui PERPRES Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2019-2024 melanjutkan visi “NAWA CITA”.

Berdasarkan visi tersebut, maka terdapat ada 9 (sembilan) agenda prioritas (NAWACITA) yang ditetapkan yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga ;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama Negara Asia lainnya ;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik ;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa ; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu kepada Visi dan Misi serta 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, maka Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar terkait ke dalam 2 (dua) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ; dan
- Mencegah dan memberantas korupsi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar memiliki beberapa program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional. Beberapa program / kegiatan yang di maksud adalah :

- Sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar ;
- Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- Rencana Aksi Daerah (RAD) program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Pematang Siantar ;
- Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Pematang Siantar;
- Penerapan Manajemen Risiko;
- Audit Ketaatan, audit kinerja, Reviu keuangan dan Dokumen Perencanaan, Reformasi Birokrasi serta kegiatan lain yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kota Pematang Siantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANG SIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 , tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan. Sehingga dengan keberadaan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar diharapkan dapat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *coorporate governance*.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022 sampai tahun 2027 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP (Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>coorporate governance</i> .	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Terlaksananya pengawasan yang berkualitas	Indeks RB area penguatan pengawasan	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP
								2. Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP
								3. Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko
								4. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan

3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar 2022-2027, yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi.

Dalam rencana kerja tahun 2024 adapun jumlah anggaran yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah sebesar Rp22.658.423.918,00 dengan rincian seperti ditunjukkan pada tabel berikut (Tabel TC 3.3).

Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	B	19.359.121.911	DAU		B	19.552.713.130,48
6	0	0	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Inspektorat	100%	129.923.406	DAU		100%	142.915.747,00
6	0	0	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	14	57.614.456	DAU		14	63.375.901,78
6	0	0	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Inspektorat	2	14.694.494	DAU		2	16.163.943,44

6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Inspektorat	2	57.614.456	DAU		2	63.375.901,78
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Inspektorat	100	9.041.879.948	DAU		100	9.946.067.942,62
6	01	01	2	02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	55	8.998.669.106	DAU		55	9.088.655.796,78
6	01	01	2	02	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	132	14.403.614	DAU		132	15.843.975,44
6	01	01	2	02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	132	14.403.614	DAU		132	15.843.975,44
6	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Inspektorat	1	14.403.614	DAU		1	15.843.975,44
6	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	100	43.210.842	DAU		100	47.531.926,33
6	01	01	2	03	02	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	4	14.403.614	DAU		4	15.843.975,44

6	01	01	2	03	05	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Inspektorat	2	14.403.614	DAU		2	15.843.975,44
6	01	01	2	03	06	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	2	14.403.614	DAU		2	15.843.975,44
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kepegawaian	Inspektorat	100	1.008.467.846	DAU		100	1.109.314.630,78
6	01	01	2	05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	55	950.853.390	DAU		55	960.361.923,90
6	01	01	2	05	#	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	1	57.614.456	DAU		1	58.190.600,72
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	100	1.005.364.851	DAU		100	1.105.901.336,58
6	01	01	2	06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	12	36.070.686	DAU		12	36.431.392,36
6	01	01	2	06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	65.685.843	DAU		12	66.342.701,31

6	01	01	2	06	03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat	12	77.586.342	DAU		12	85.344.975,76
6	01	01	2	06	04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Inspektorat	12	137.875.926	DAU		12	139.254.685,44
6	01	01	2	06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	13.933.263	DAU		12	14.072.595,73
6	01	01	2	06	08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	12	69.912.200	DAU		12	76.903.420,00
6	01	01	2	06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12	562.832.600	DAU		12	568.460.926,00
6	01	01	2	06	##	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Inspektorat	12	41.467.992	DAU		12	41.882.672,10
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	505.000.000	DAU		100	510.050.000,00
6	01	01	2	07	02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat	3	80.800.000	DAU		3	81.608.000,00

6	01	01	2	07	05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	30	121.200.000	DAU		30	122.412.000,00
6	01	01	2	07	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Inspektorat	30	202.000.000	DAU		30	204.020.000,00
6	01	01	2	07	##	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	30	50.500.000	DAU		30	51.005.000,00
6	01	01	2	07	##	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	30	50.500.000	DAU		30	51.005.000,00
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	284.521.452	DAU		100	312.973.597,29
6	01	01	2	08	01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12	73.376.500	DAU		12	74.110.265,00
6	01	01	2	08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12	53.221.352	DAU		12	53.753.565,60
6	01	01	2	08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	157.923.600	DAU		12	159.502.836,00

6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah'	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	7.340.753.565	DAU		100	8.074.828.921,91
6	01	01	2	09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	12	148.537.854	DAU		12	150.023.232,36
6	01	01	2	09	06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Inspektorat	5	101.000.000	DAU		5	102.010.000,00
6	01	01	2	09	##	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Inspektorat	1	7.091.215.712	DAU		1	7.162.127.868,67
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Inspektorat		2.151.359.696	DAU			2.175.665.585,12
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	100%	1.489.222.457	DAU		100 %	1.506.906.973,47
6	01	02	2	01	01	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	4	124.101.871	DAU		4	125.342.890,11
6	01	02	2	01	02	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	15	465.382.018	DAU		15	470.035.837,93

6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		6	186.152.807	DAU		6	188.014.335,17
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	2	62.050.936	DAU		2	62.671.445,06
6	01	02	2	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat	1	31.025.468	DAU		1	34.128.014,64
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	20	620.509.357	DAU		20	626.714.450,57
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	100%	662.137.239	DAU		100 %	668.758.611,64
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Inspektorat	5	155.127.339	DAU		5	156.678.612,64
6	01	02	2	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	15	507.009.900	DAU		15	512.079.999,00
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Inspektorat		1.147.942.310	DAU			1.159.421.733,55
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	100%	248.203.743	DAU		100 %	250.685.780,23

6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4	124.101.871	DAU		4	125.342.890,11
6	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4	124.101.871	DAU		4	125.342.890,11
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	100%	899.738.568	DAU		100 %	908.735.953,33
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	16	310.254.679	DAU		16	313.357.225,29
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	8	248.203.743	DAU		8	250.685.780,23
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	10	310.254.679	DAU		10	313.357.225,29
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	1	31.025.468	DAU		1	31.335.722,53
										22.658.423.918				22.887.800.449

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar menyusun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dalam upaya pencapaian target organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2022-2027. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	B	19.359.121.911	DAU	
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Inspektorat	100%	129.923.406	DAU	
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	14	57.614.456	DAU	
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Inspektorat	2	14.694.494	DAU	
6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Inspektorat	2	57.614.456	DAU	

6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Inspektorat	100	9.041.879.948	DAU	
6	01	01	2	02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	55	8.998.669.106	DAU	
6	01	01	2	02	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	132	14.403.614	DAU	
6	01	01	2	02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	132	14.403.614	DAU	
6	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Inspektorat	1	14.403.614	DAU	
6	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	100	43.210.842	DAU	
6	01	01	2	03	02	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	4	14.403.614	DAU	
6	01	01	2	03	05	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Inspektorat	2	14.403.614	DAU	

6	01	01	2	03	06	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	2	14.403.614	DAU	
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kepegawaian	Inspektorat	100	1.008.467.846	DAU	
6	01	01	2	05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	55	950.853.390	DAU	
6	01	01	2	05	#	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	1	57.614.456	DAU	
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	100	1.005.364.851	DAU	
6	01	01	2	06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	12	36.070.686	DAU	
6	01	01	2	06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	65.685.843	DAU	
6	01	01	2	06	03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat	12	77.586.342	DAU	

6	01	01	2	06	04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Inspektorat	12	137.875.926	DAU	
6	01	01	2	06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	13.933.263	DAU	
6	01	01	2	06	08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	12	69.912.200	DAU	
6	01	01	2	06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12	562.832.600	DAU	
6	01	01	2	06	##	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Inspektorat	12	41.467.992	DAU	
6	01	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	505.000.000	DAU	
6	01	01	2	07	02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat	3	80.800.000	DAU	
6	01	01	2	07	05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	30	121.200.000	DAU	

6	01	01	2	07	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Inspektorat	30	202.000.000	DAU	
6	01	01	2	07	##	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	30	50.500.000	DAU	
6	01	01	2	07	##	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	30	50.500.000	DAU	
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	284.521.452	DAU	
6	01	01	2	08	01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12	73.376.500	DAU	
6	01	01	2	08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12	53.221.352	DAU	
6	01	01	2	08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12	157.923.600	DAU	
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah'	Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	100	7.340.753.565	DAU	

6	01	01	2	09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	12	148.537.854	DAU	
6	01	01	2	09	06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Inspektorat	5	101.000.000	DAU	
6	01	01	2	09	##	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Inspektorat	1	7.091.215.712	DAU	
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Inspektorat		2.151.359.696	DAU	
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	100%	1.489.222.457	DAU	
6	01	02	2	01	01	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	4	124.101.871	DAU	
6	01	02	2	01	02	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	15	465.382.018	DAU	
6	01	02	2	01	03	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		6	186.152.807	DAU	

6	01	02	2	01	04	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	2	62.050.936	DAU	
6	01	02	2	01	06	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat	1	31.025.468	DAU	
6	01	02	2	01	07	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	20	620.509.357	DAU	
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	100%	662.137.239	DAU	
6	01	02	2	02	01	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah</i>	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Inspektorat	5	155.127.339	DAU	
6	01	02	2	02	02	<i>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	15	507.009.900	DAU	
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Inspektorat		1.147.942.310	DAU	
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	100%	248.203.743	DAU	

6	01	03	2	01	01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4	124.101.871	DAU	
6	01	03	2	01	02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4	124.101.871	DAU	
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	100%	899.738.568	DAU	
6	01	03	2	02	01	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	16	310.254.679	DAU	
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	8	248.203.743	DAU	
6	01	03	2	02	03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	10	310.254.679	DAU	
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	1	31.025.468	DAU	
										22.658.423.918		

BAB V

P E N U T U P

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagai Lembaga/Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar secara umum berkaitan langsung dengan berbagai perubahan yang terjadi seiring dengan bergulingnya reformasi.

Reformasi dibidang pemerintahan telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah baik pada tatanan kebijakan/peraturan perundang-undangan maupun implementasinya. Reformasi juga telah mendorong munculnya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat terhadap terciptanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Meningkatnya pengawasan masyarakat antara lain dapat dilihat dari pemberitaan media masa tentunya menuntut adanya peningkatan dari aparatur pengawasan, termasuk Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah. Peningkatan kinerja pengawasan ini akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat (publik) terhadap pemerintah daerah yang tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah termasuk pembangunan daerah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2024 disusun dengan maksud agar Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pematang Siantar, April 2023

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, S.H

PEMBINA

NIP : 19810927 200502 1 001